

Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik



Magister Administrasi Publik
Universitas Esa Ungul

Dosen: M. Cholifihani, MA, Ph.D

Sabtu, 23 Maret 2019

Pendahuluan

- ❑ Penelitian evaluasi kebijakan publik masih membingungkan krn masih kurangnya konsensus kriteria untuk menilai dampak dari kebijakan publik (Pollitt 1995)
- ❑ Masyarakat sbg penerima manfaat kebijakan publik memperhatikan kuantitas dan kualitas dari barang dan jasa publik
- ❑ Aparatur lebih melihat bagaimana (how) memberikan pelayanan dari pada apa (what) yang akan diberikan kpd masyarakat
- ❑ Pembayar pajak (tax-payers) lebih mementingkan berapa biaya yang paling efektif

Penetapan Kriteria Evaluasi

- ❑ Ada banyak metode penetapan kriteria evaluasi yang diusulkan
 - ❑ Pertama, kajian terhadap pencapaian tujuan-tujuan kebijakan dari policy-makers, sebagaimana tersirat dalam peraturan-perundang2an, dokumen pemerintah dan pidato2 kenegaraan. (official objectives)
 - ❑ Kedua, menggunakan kriteria sendiri untuk menilai sukses atau gagalnya suatu pelaksanaan kebijakan (idiosyncratic and subjective)
 - ❑ Ketiga, pengembangan kriteria evaluasi yang mengacu kepada permasalahan/manfaat yang dihasilkan:
 - Identifikasi semua pemangku kepentingan yang relevan yang menerima dampak dari kebijakan
 - Identifikasi kriteria evaluasi dari masing2 pemangku kepentingan mana yang terpenting bagi mereka
 - Memberikan "weights" kepada setiap preferensi dari masing2 group pemangku kepentingan
- Dengan keterlibatan stakeholders sehingga evaluasi semakin sulit dilakukan karena preferensi dari mereka yang tentunya berbeda2.

Kriteria Evaluasi

- ❑ Intrinsic evaluasi dalam memperbaiki kinerja: Efficiency dan Responsiveness (Boyle 1998 & Mueller 1999)
- ❑ Pengertian Intrinsic evaluasi terlalu sempit dalam tujuan kebijakan publik
- ❑ Ditambahkan "Equity" (tingkat pemerataan dalam sasaran kebijakan publik)

Efficiency

- ❑ Technical efficiency: rasio pelayanan publik antara input (spending) terhadap output (pelayanan publik)
- ❑ Allocative efficiency: tingkat kesesuaian antara output dengan preferensi masyarakat (apakah pelayanan pendidikan sudah sesuai dengan keinginan orang tua murid dan murid)
- ❑ Allocative efficiency overlap dengan definisi Responsiveness
- ❑ Technically efficiency fokus pd unit biaya. Sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan pelayanan yg diberikan
- ❑ Perbedaan yg signifikan antara biaya sebelum dan sesudah kebijakan publik itu dibuat

Efficiency

- Perhitungan biaya langsung yang diperhitungkan dalam lembaga publik untuk memberikan pelayanan
- Kuantitas output pelayan publik
- Kualitas output pelayanan publik

Responsiveness

- ❑ Intervensi negara dilakukan jika terjadi kegagalan mekanisme pasar swasta dalam memberikan pelayanan publik
- ❑ Kegagalan pasar dapat berupa tidak mencukupinya suplai terhadap permintaan publik thd barang dan jasa publik
- ❑ Barang dan jasa publik yang disediakan oleh swasta tidak dapat memenuhi preferensi publik
- ❑ Kekurangan responsiveness pihak swasta thd kebutuhan barang jasa publik, tentunya hrs dipenuhi oleh Pemerintah

Responsiveness

Reformasi manajemen publik menuju kepada lebih responsive atau tidak dapat diukur sbb:

1. Kepuasan konsumen, tapi kepuasan terhadap apa ?
2. Kepada siapa aparatur sebaiknya merespon ketika pembuat keputusan merencanakan dan menetapkan kebijakan publik ? Kepada semua stakeholders ?
3. Kegiatan dan kinerja lembaga publik biasanya dibagi dalam 3 kategori: inputs (anggaran, staffing dan equipments); outputs (quantity, quality dan aksesibilitas); dan outcomes (manfaat dari tujuan kebijakan publik)
4. Responsiveness adalah memenuhi kebutuhan sesuai dengan preferensi publik yang merupakan subset dari kinerja lembaga publik

Responsiveness

- Preferensi masyarakat = voters
- Mekanisme politik untuk menjaring preferensi masyarakat
- Pemilu = perencanaan awal kebijakan publik (political planning)
- Kelemahan political planning = one man-one vote; sulit merepresentasikan masyarakat yang heterogen
- Solusinya ? Development Planning !!!!

Equity

- ❑ Bukan kamu mendapatkan apa yang kamu bayar tetapi kamu mendapatkan apa yang kamu mau
- ❑ Evaluasi thd equity (pemerataan) terdapat 2 pertanyaan yang perlu dijawab yaitu: 1. aspek apa dari pelayanan publik yang dapat diberikan secara merata? 2. Apakah berbagai group dlm masyarakat seharusnya terlayani secara sama dan merata ?

Evaluation Criteria of Equity

- ❑ Spending (pengeluaran anggaran); pemerataan pengeluaran tidak menjamin mendapatkan hasil pemerataan yang diinginkan
- ❑ Use (penggunaan); berbagai lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama ?
- ❑ Access ; mempunyai akses yang sama thd pelayanan dan barang publik
- ❑ Outcome (manfaat); manfaat akan sangat beragam dari satu pelayanan dan barang publik ke pelayanan dan barang publik lainnya
- ❑ Final Income

TERIMA KASIH